

buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



**SFOA Perkuat PBK
Anggota G-20**

**SRG
Pendobrak Ekonomi
Provinsi Lampung**

**Hedging BUMN
Tidak Mesti Gunakan
Bursa Berjangka**

**Bayu Krisnamurthi:
Industri PBK Harus Ditangani
Lebih Serius**



DAFTAR ISI

Berita Utama.....	4-5
- Bayu Krisnamurthi: Industri PBK Harus Ditangani Lebih Serius	
Berjangka.....	6-9
- SFOA Perkuat PBK Anggota G-20 - ICDX Broker Awards 2014 Mengapresiasi Kinerja Pialang dan Pedagang Berjangka	
Resi Gudang.....	10-11
- SRG Pendobrak Ekonomi Provinsi Lampung	
Pasar Lelang.....	12-13
Geliat Pasar Lelang Naik 11,24 %	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- Hedging BUMN Tidak Mesti Gunakan Bursa Berjangka - Bisnis SRG Potensial Digarap Generasi Muda - Terbukti 'Main Mata' Izin Surveyor Indonesia Terancam Dicabut - Nasib LP2RG Tunggu Keputusan Kemenkeu dan Kementerian BUMN	
Analisa.....	18
Breaking News.....	19
Info SRG.....	20-21

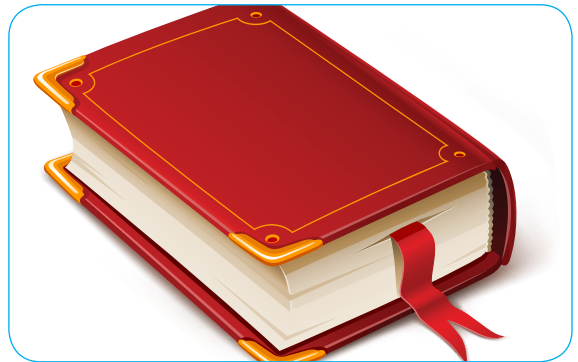
Kiprah...26-27

Basrah Pardomuan
Pionir SRG Kabupaten Langkat



Forum...22

Pembinaan Industri PBK



Kolom...23-25

Bursa Berjangka
Sebagai Mata Pencaharian
Nasabah



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



buletin
Bappebti
BULETIM HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab
Sutrisno Edi

Pemimpin Redaksi
Sri Nastiti Budianti

Wakil Pemimpin Redaksi
Taufik K.S

Dewan Redaksi
Subagiyo, Saleh Abich, Himawan
Purwadi, Yuli Edi Subagio, Annisa F.
Wulandari, Poppy Juliyanti, Yovian Andri
P., Tomi Setiawan

Sirkulasi
Apriliyanto, Katimin, Gita Regina
Napitupulu

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

*Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id*



Foto : Keluarga besar Bappebti menyelenggarakan outbond untuk peningkatan kinerja pegawai, Bogor, 17-19 Oktober 2014.

Presiden Joko Widodo, memberi kepercayaan penuh terhadap Rachmat Gobel di dalam memimpin Kementerian Perdagangan setidaknya hingga lima tahun ke depan. Dilantik hari Senin pagi, 27 Oktober 2014, pada malam harinya langsung menggelar acara serah terima jabatan dengan Muhammad Lutfi.

Di kesempatan memberi sambutan, Rachmat Gobel, berupaya mencairkan suasana dengan melontarkan berbagi gurauan. Meski terkesan santai, acara itu tetap menyimpan sejumlah pesan.

Seperti diturkannya, Kementerian Perdagangan yang berada di gerbong Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengemban tiga tugas utama yakni, menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok, meningkatkan volume ekspor dan daya saing komoditi Indonesia di pasar global serta, menjaga laju produk impor di pasar domestik.

"Tiga tugas utama yang diamanatkan presiden itu bermuara pada kepentingan nasional di dalam terciptanya kedaulatan bangsa," ujar pria kelahiran Jakarta, 3 September 1992, ini.

Menurut alumnus Univ. Chuo, Tokyo, Jepang, itu, berbagai kesepakatan dan kerjasama perdagangan internasional harus dihormati. "Tetapi semua itu tidak ada artinya jika kita dengan jumlah penduduk yang demikian besar menjadi pasar dari berbagai produk impor. Karena itu, kita harus menciptakan produk atau komoditi yang memiliki daya saing kuat di pasar global," katanya.

Setelah acara serah terima jabatan itu, Buletin Bappebti, berkesempatan berdialog dengan Bayu Krisnamurthi (mantan Wakil

Menteri Perdagangan). Dalam dialog singkat itu, Buletin Bappebti, meminta 'catatannya' tentang industri perdagangan berjangka komoditi. Maka, mengalirlah sejumlah kalimat yang kemudian dirangkai Redaksi pada laporan Berita Utama, edisi ini.

Sedikit bergeser dari 'catatan' Bayu Krisnamurthi, tentang industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia, Kelpaa Bappebti dan rombongan diakhir September 2014, melakukan perjalanan dinas ke Geneva, Swiss, untuk mengikuti Burgenstock Meeting. Pertemuan itu merupakan forum tahunan yang membahas kekinian industri derivatif dunia.

Salah satu isu menarik yang dibahas dalam pertemuan itu, terkait komitmen dan tujuan negara-negara anggota G-20 di bidang perdagangan berjangka komoditi dan *option*. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara anggota G-20.

Pesan yang dapat dipetik dari pertemuan itu, regulator anggota G-20 diminta untuk melakukan perbandingan pengaturan dan pengawasan pasar derivatif dari langkah yang sudah ambil China, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Pengaturan dan pengawasan yang dimaksud adalah terkait infrastruktur pasar *over the counter (OTC) derivatives*.

Laporan perjalanan dinas Kepala Bappebti, ke Geneva itu, juga menjadi salah satu sajian Redaksi pada edisi ini. Dan di samping itu, Redaksi juga melaporkan perkembangan industri perdagangan berjangka, sistem resi gudang- SRG dan pasar lelang komoditi agro-PLKA. Selamat membaca.

Salam!



Bayu Krisnamurthi: Industri PBK Harus Ditangani Lebih Serius

Dilantik menjadi Wakil Menteri Perdagangan, pada Kabinet Indonesia Bersatu II, pada 18 Oktober 2011, bertepatan dengan hari ulang tahun Bayu Krisnamurthi, tentunya memiliki sejumlah catatan yang patut dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air.

Semakin modernnya kegiatan perdagangan di tanah air, mekanisme perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan oleh bursa berjangka sangat diperlukan. Sebab itu bursa berjangka harus inovatif dan mampu menciptakan produk-produk baru yang dimintai dunia usaha. Di samping itu, bursa berjangka dapat memainkan perannya menjadi media antara industri hulu dan hilir.

Demikian antara lain diutarakan mantan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, kepada Buletin Bappebti, disela-sela acara serah terima jabatan menteri perdagangan, Senin, 27

Oktober 2014, di Gedung Kementerian Perdagangan.

"Potensi industri perdagangan berjangka komoditi kita sangat besar. Karena itu harus ditangani lebih serius. Sehingga mekanisme perdagangan kita semakin modern, dan semakin terbantu dengan adanya bursa berjangka," kata Bayu.

Lebih jauh dikatakan Bayu, ada banyak PR- pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dan semua PR itu telah kita sampaikan kepada Pak Rachmat Gobel- Menteri Perdagangan. Semoga nantinya beliau dapat menyelesaikannya dengan cepat.



"Tentunya pengembangan bursa berjangka itu dari sisi kontrak berjangka multilateral. Karena masih banyak komoditi kita yang belum diperdagangkan di bursa. Kalau jenis kontrak bilateral dalam mekanisme sistem perdagangan alternatif- SPA, tidak perlu dikembangkan pun akan jalan sendiri," tegas Bayu.

"Seharusnya kontrak berjangka multilateral itulah yang utama di perdagangan bursa berjangka. Sedangkan SPA itu, hanya sebagai pelengkap," katanya.

Di sisi lain dikatakan Bayu, pengembangan kontrak berjangka komoditi harus datang dari bursa berjangka. Karena karakteristik komoditi akan menggambarkan sebuah bursa berjangka.

"Kita- pemerintah tidak mungkin memaksakan sesuatu komoditi untuk diperdagangkan di bursa berjangka, tanpa dilakukan pengkajian sampai dengan mengumpulkan para pelakunya. Inilah bagian dari tugas pokok bursa berjangka," terang Bayu.

Amalgamasi

Menurut Bayu Krisnamurthi, salah satu PR dari sederet prioritas yang harus terus didiskusikan di jajaran Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel adalah amalgamasi bursa berjangka.

"Amalgamasi bursa berjangka itu adalah salah satu PR yang tertunda. Karena itu kita harapkan nantinya Pak Rachmat bisa meneruskannya. Sehingga bursa berjangka semakin berkembang dan bisa mendukung sektor perdagangan kita," imbuh Bayu Krisnamurthi.

Dari kacamata Bayu, amalgamasi bursa berjangka itu bukanlah sesuatu yang dihindari karena fenomena global pun menunjukkan adanya tren merger atau pun akuisi bursa.

"Karena dari dua bursa berjangka yang ada memiliki latar belakang berbeda, maka di sinilah peran pemerintah untuk menjembatani terjadinya proses amalgamasi itu. Tujuan kita hanya satu, yakni bagaimana kita memiliki instrumen

"Ini kesempatan besar bagi bursa berjangka untuk menciptakan kontrak berjangka biofuel. Sebab sampai saat ini belum ada negara produsen CPO yang memiliki pasar futures biofuel"

pasar di dalam negeri dan menciptakan harga acuan komoditi," terang Bayu.

Kita sudah terlalu jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara lain, tambahnya. Lantas mengapa kita tidak saling merangkul sehingga menjadi lebih kuat dan mampu bersaing dengan bursa yang ada. "Kita yang punya barangnya kok!"

"Di Eropa tidak ada tanaman kelapa sawit, kopi dan lainnya, tetapi ketika kita mau melakukan ekspor harganya berdasarkan harga yang terjadi di bursa sana. Sangat tidak rasional 'kan? Karena itu, sebagai negara yang berdaulat kita pun harus mampu menciptakan pasar di dalam negeri," tegas Bayu Krisnamurthi.

Dari catatan Buletin Bappebti, wacana amalgamasi bursa berjangka (Jakarta Futures Exchange- JFX dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI), untuk pertama kalinya digagas oleh mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, pada awal tahun 2013. Wacana amalgamasi itu juga merupakan salah satu dari empat poin komitmen kerja Kepala Bappebti terhadap Menteri Perdagangan selama satu tahun kerja.

Futures Biofuel

Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia dengan menguasai pangsa pasar sekitar 80 %, bursa berjangka di Indonesia sudah saatnya memikirkan dan menciptakan kontrak berjangka komoditi biofuel yang diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan demikian Indonesia menjadi produsen CPO dan sekaligus sebagai pasar komoditi biofuel.

"Ini kesempatan besar bagi bursa berjangka untuk menciptakan kontrak berjangka biofuel. Sebab sampai saat ini belum ada negara produsen CPO yang memiliki pasar futures biofuel," sambung Bayu Krisnamurthi.

"Saat ini di bursa berjangka 'kan sudah ada kontrak CPO dan Olein, jadi kalau ada kontrak biofuel akan membuat pasar lebih dinamis. Apa lagi pasar biofuel di tanah air sudah tercipta dengan adanya kebijakan Kementerian ESDM, demikian juga di mancanegara. Karena itu pasarnya sudah sangat terbuka," katanya.

Menurut Bayu, kebijakan Kementerian ESDM dalam peningkatan penggunaan biofuel yang didukung adanya pasar biofuel di dalam negeri, akan mengurangi ketergantungan impor minyak. Sehingga dapat menekan defisit neraca perdagangan.

"Jadi keuntungannya pun sangat banyak. Dengan penggunaan 3 juta ton CPO saja di dalam negeri untuk biofuel, akan berdampak positif kepada petani kelapa sawit. Sehingga produksi CPO Indonesia ke depan akan terus bertumbuh. Karena itu, gagasan penggunaan CPO sebagai bahan biofuel dan adanya bursa berjangka yang menawarkan kontrak biofuel, harus terus didorong," tandasnya Bayu Krisnamurthi. 



SFOA Perkuat PBK Anggota G-20

"Burgenstock Meeting" pertemuan tahunan ke 35, ini, membahas komitmen G-20 di bidang pasar berjangka (futures) maupun opsi (options).

Perdagangan berjangka komoditi (PBK) merupakan perdagangan yang kompleks dan berisiko tinggi, sehingga pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang yaitu UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang PBK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011. Dalam UU ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diberi tugas melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan.

Sebagai regulator PBK tertinggi di Indonesia, Bappebti tentunya harus memiliki kompetensi di bidangnya. Karena itu, untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan PBK, Bappebti ikut berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan atau sidang-sidang yang diselenggarakan oleh asosiasi perdagangan berjangka atau regulator dunia. Salah satunya, yaitu sidang atau pertemuan tahunan yang diselenggarakan secara rutin

oleh *Swiss Futures and Options Association* (SFOA) yang dikenal dengan "Burgenstock Meeting".

Pada 23-25 September 2014 lalu, SFOA telah menggelar pertemuan yang ke-35, di Intercontinental Hotel Geneva, Swiss. Pertemuan itu dihadiri oleh badan otoritas (pasar modal dan berjangka), asosiasi, bursa, bank, pialang, kliring dan lembaga keuangan lainnya dari berbagai negara. Sebagai informasi, dalam 2 tahun terakhir, SFOA telah menggandeng *Futures Industry Association* (FIA) untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

"Pertemuan itu membahas beberapa isu penting antara lain membahas mengenai pelaksanaan komitmen G-20 tahun 2009," kata Sutriyono Edi sebagai Kepala Bappebti sekaligus peserta delegasi Indonesia yang menghadiri pertemuan "Burgenstock Meeting" ke-35.

Selain Kepala Bappebti, peserta lain yang ikut di antaranya, Kepala Bagian

Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Bappebti, Taufik, dan Kepala Sub Bagian Pelanggaran Transaksi I, Bappebti, Amser Irawan Panjaitan.

Menurut Sutriyono, setiap tahunnya SFOA mengadakan sidang yang dihadiri oleh regulator, bursa, kliring, dan para pelakunya serta pihak-pihak terkait lainnya seperti ahli lembaga kliring, lembaga keuangan (bank) dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman, informasi dan membahas berbagai masalah hangat yang sedang dihadapi para regulator dan kliring.

Sedangkan tujuan dari pertemuan *Burgenstock meeting* ini adalah untuk memperoleh pengetahuan maupun wawasan terkait perkembangan PBK saat ini dan akan datang.

"Masukan yang diperoleh selama pertemuan dapat juga digunakan untuk kemajuan perdagangan berjangka pada umumnya dan menjaga integritas pasar



dan atau keuangan, serta melindungi masyarakat dari praktek yang merugikan pada khususnya,” terangnya.

Selain itu, dengan keikutsertaan Bappebti dalam sidang ini diharapkan akan terjalin kerjasama yang lebih erat antara Bappebti dengan para regulator di seluruh dunia dan badan atau lembaga sektor keuangan lainnya. “Sehingga jika timbul suatu permasalahan terkait perdagangan berjangka antar negara, maka akan dapat diselesaikan secara terkoordinasi,” ungkap Sutriono.

Selain peserta dari Indonesia, kata Sutriono, pertemuan International SFOA & FIA Burgenstock ke-35 juga dihadiri oleh para regulator dan para praktisi pasar derivatif dan *option* dari Kanada, Austria, China, Perancis, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Jerman, Afrika Selatan, Inggris, Turki, dan lainnya. “Agenda penting yang telah dilaksanakan dalam pertemuan yang ke 35 ini adalah Pertemuan Regulator dan Pertemuan Panelis,” ujarnya.

Futures & Option G-20

Untuk Pertemuan Regulator, dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014. Pertemuan dihadiri oleh wakil dari 17 negara antara lain Kanada, Austria, China, Perancis, Jerman, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Belanda, Polandia, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Pertemuan para regulator ini dipimpin Alexander Karrer (Deputy State Secretary, State Secretary for International Finance Swiss Federal Department of Finance).

“Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah komitmen terhadap tujuan G-20 dan bagaimana penerapannya. Kemudian, menjelaskan berbagai isu global yang terjadi, tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya, serta menjelaskan perbedaan mekanisme *futures* dan *option* di berbagai negara,” terang Sutriono.

Dia juga bilang, pembahasan dalam pertemuan regulator terkait dengan

pengaturan perkembangan, dan pengawasan pasar derivatif di beberapa negara peserta G-20 seperti China, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, dapat dijadikan bahan perbandingan bagi negara peserta G-20 lainnya.

Selanjutnya pada pertemuan panelis, pada tanggal 24-25 September 2013, ada beberapa diskusi panel dari beberapa pembicara. Menurut Sutriono Edi, dalam panel dengan tema diskusi ‘Juggling Regulatory, Member and End User Demand’, dibahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga kliring dalam memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan dan pemenuhan kebutuhan anggota kliring dan nasabah, serta persaingan antara lembaga kliring dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anggota kliring.

“Dalam diskusi panel dibahas mengenai bagaimana model kliring berjangka tradisional berubah terkait dengan status persyaratan dari rekening terpisah, tantangan lintas batas dan risiko dari CCP,” jelas Sutriono.

Selain itu, ada juga sesi panel interaktif yang terkait dengan perubahan dramatis dalam struktur pasar yang menempatkan peningkatan tekanan pada perantara (*intermediary*) - menekan sumber daya dan membatasi peluang pendapatan. “Panel ini membahas bagaimana peran perantara berubah karena tuntutan atau permintaan nasabah baru, peningkatan likuiditas dan persyaratan permodalan, serta dampak dari adanya MiFID, EMIR dan Dodd-Frank,” ujarnya.

Dalam panel dengan tema *Regulatory Reform Panel*, dibahas mengenai perkembangan reformasi peraturan di Eropa dan Amerika Serikat oleh masing-masing Regulator dan kemajuan dalam melakukan harmonisasi peraturan terkait transaksi antar batas Negara. Untuk panel dengan tema *CCP Risk*, dibahas peran CCP dalam sistem keuangan. Karena itu, para pelaku pasar sangat tertarik terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dilakukan oleh CCP. “Dalam melakukan tugasnya mengkliringkan OTC

derivatif, CCPs ini harus aman dan tangguh. Panelis berdiskusi terkait dengan update status CCP secara global, Uni Eropa, dan apakah saat ini standar IOSCO-CPSS PFMI cukup mengatur mengenai risiko CCP,” kata Sutriono.

Sedangkan panel dengan tema *Accessing Global Markets*, para panelis berdiskusi tentang berbagai inisiatif di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat yang membuat akses pasar semakin menantang ketika adanya *trading* otomatis yang mempermudah Nasabah untuk mengakses pasar di dunia.

Ada juga panel dengan tema *The Future of Non-Exchange Trading Platforms*. “Panel ini membahas *trading platform* yang baru akibat dari permintaan nasabah di Inggris dan jenis model eksekusi transaksi, produk yang ditawarkan, dan target nasabah,” ujarnya.

Untuk panel dengan tema *Benchmarks*, dibahas perbandingan antara regulator dan praktisi pasar dalam penggunaan metode dalam menentukan harga di pasar keuangan dan pasar komoditi.

“Sedangkan panel dengan tema *Transaction Reporting* mengulas kemajuan yang dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan dalam pelaporan transaksi yang diatur dalam EMIR, MIFID atau MIFIR, dan REMIT,” jelas Sutriono.

Adapun panel dengan tema *Challenges in Commodity Trade Finance*, membahas mengenai pembiayaan dalam perdagangan komoditi dalam hal terjadinya kekurangan likuiditas pembiayaan. “Pembiayaan tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Basel II atau III,” ujarnya.

Untuk panel dengan tema *GTSA Presents: Regulation & Transparency* membahas tren peraturan saat ini dari perspektif industri perdagangan komoditas yang bergerak dalam bidang perdagangan fisik dan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pasar fisik diatur. Selain itu, ada juga panel dengan tema *Price Discovery: The Fragile Link Between the Physical Market and Futures*. ☺



ICDX Broker Awards 2014 Mengapresiasi Kinerja Pialang dan Pedagang Berjangka



A nugerah penghargaan itu merupakan sebuah wujud apresiasi dan motivasi. Hal tersebut memang perlu dilakukan di semua sektor bisnis, tak terkecuali industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Terkait itu, BKDI menyelenggarakan *Broker Awards* 2014, pada 16 Oktober 2014 lalu. Acara ini diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan "Brokers Outing Event" yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand.

"Momen ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan kepada para pialang berjangka dan penyelenggara (pedagang) yang telah terdaftar di BKDI," kata Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja.

Megainjugabilang, *ICDX Broker Awards* merupakan inisiatif yang diselenggarakan

oleh BKDI sebagai penghargaan dan motivasi khususnya kepada para pialang berjangka dan penyelenggara yang telah mendedikasikan diri dalam melakukan transaksi komoditi dan turunannya melalui BKDI.

Dalam *Broker Awards* 2014, para pemenang dihitung berdasarkan volume transaksi per tahun yang diakumulasikan sejak bulan Juli 2013 hingga bulan Agustus 2014, dengan melihat performa dari 30 pialang berjangka dan 8 penyelenggara.

"Tahun ini, *Broker Awards* 2014 dianugerahkan kepada 11 perusahaan yang terbagi atas pialang berjangka dan penyelenggara," jelas Megain.

Kategori penghargaan yang dianugerahkan BKDI terhadap perusahaan pialang mencakup kategori volume transaksi tertinggi untuk *Palm*



Product, Deliverable Gold, Spot Gold, dan PALN (Penyaluran Amanat Luar Negeri).

Sedangkan untuk kategori perusahaan pialang dan pedagang penyelenggara dalam skema sistem perdagangan alternatif- SPA, BKDI mematok kategori yang mencakup *Most Dedicated OTC Broker* dan *Trader*, serta *Top Three Brokers*.

Sebagai catatan, ICDX Broker Awards 2014 merupakan momen yang baru pertama kali digelar sepanjang BKDI beroperasi. Meski demikian, Megain Widjaja memastikan, BKDI berencana agar acara ini dapat diselenggarakan secara konsisten setiap tahun. "Acara ini akan kami lakukan rutin setiap tahunnya," tegasnya.

ICDX Broker Awards 2014

1. PT Sinarmas Futures untuk kategori Most Volume – Palm Product
2. PT Topgrowth Futures untuk kategori Most Volume – Deliverable Gold
3. PT Phillip Futures untuk kategori Most Volume – Spot Gold (GOLDGR, PAMPGOLD)
4. PT Phillip Futures untuk kategori Most Volume – PALN (Penyaluran Amanat Luar Negeri)
5. PT Monex Investindo Futures untuk kategori Most Volume – OTC Broker
6. PT Surya Anugrah Mulya untuk kategori Most Volume – OTC Trader
7. PT Century Investment Futures untuk kategori Most Dedicated OTC Broker
8. PT Prolindo Buana Semesta untuk kategori Most Dedicated OTC Trader

Top Three Brokers of the Year

1. PT Monex Investindo Berjangka
2. PT Topgrowth Futures
3. PT Millennium Penata Futures



BKDI-KRX Berkolaborasi PBK

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) lakukan kerjasama pengembangan perdagangan berjangka dengan Korea Exchange (KRX).

Pintu kerjasama perdagangan berjangka komoditi (PBK) antara Indonesia dengan Korea Selatan telah terbuka. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dengan Korea Exchange (KRX), Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja dengan Komisaris & Direktur Utama KRX, Kyungsoo Choi, di kantor pusat KRX, Seoul, Korea Selatan, 30 September 2014, lalu.

"Tujuan dari penandatanganan kerjasama ini adalah agar terbukanya pintu kerjasama di antara kedua belah pihak dalam rangka penyediaan fasilitas transaksi perdagangan berjangka yang lebih baik di Indonesia dan Korea Selatan," terang Megain.

Dia juga bilang, perjanjian ini berfungsi sebagai dasar untuk melanjutkan kerjasama yang lebih erat dalam mengembangkan produk-produk inovatif, sistem teknologi dan informasi untuk keperluan perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi. "Perjanjian ini juga dimaksudkan sebagai sarana dalam pertukaran informasi dalam rangka pengembangan bisnis," katanya.

Dari kacamata Megain, KRX merupakan salah satu bursa terbesar di dunia yang telah berhasil dalam mengoperasikan salah satu produk derivatif terbaik. "Kami sangat antusias untuk melihat peluang bisnis dan pertukaran informasi bisnis yang dapat dilakukan bersama dengan KRX," katanya.

Dia juga percaya melalui kerjasama ini, BKDI dapat mengembangkan produk komoditi unggulan dan produk berbasis finansial serta mengembangkan solusi yang inovatif untuk mengakomodir kebutuhan pasar di Indonesia.

Sedangkan menurut Kyungsoo Choi, kinerja BKDI sebagai bursa berjangka cukup membanggakan. Dia mengatakan, BKDI merupakan bursa yang muda dan dinamis di mana komoditi Indonesia dan turunannya seperti emas, minyak kelapa sawit dan timah telah diperdagangkan melalui BKDI.

"Melalui kerjasama ini, selain mendapatkan peluang bisnis di area yang berbeda seperti pengembangan sistem informasi dan teknologi, KRX juga mendapatkan kesempatan untuk menjalin kerjasama jangka panjang yang strategis dengan BKDI," harap Kyungsoo Choi.



SRG Pendobrak Ekonomi Provinsi Lampung

Kementerian Perdagangan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong implementasi Sistem Resi Gudang (SRG).

Seuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 9 Tahun 2011, SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrik) sebagai suatu instrumen pembiayaan perdagangan. Hal itu, karena SRG dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditas) yang disimpan di gudang.

Tak hanya itu, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga resi gudang (S-SRG) sebesar 6% per tahun. SRG juga dapat diupayakan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Bahkan, dengan adanya SRG memungkinkan para pelaku usaha memperoleh kepastian kualitas dan kuantitas atas komoditas yang disimpan di gudang, keterjaminan suplai, meningkatkan *cash-flow*, serta pembiayaan bagi ekspor. Adapun dokumen resi gudang dalam transaksi *letter of*

credit akan menambah keyakinan *issuing bank* dan *nominated bank*, serta dapat mencegah *fraud* dalam transaksi ekspor.

Dengan banyaknya manfaat SRG itu, membuat Kemendag terus berupaya agar implementasi instrumen ini dapat berjalan maksimal. Salah satunya yaitu Pencanaan Operasional SRG di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, 14 Oktober 2014 lalu. Pencanaan itu, dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan RI. Bayu Krisnamurthi bersama Gubernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bachtiar Basri dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sutriyono Edi.

"Upaya mendorong perluasan pelaksanaan SRG terus dilakukan seperti pembentukan kelompok kerja, sosialisasi, serta pelatihan tenaga penyuluh dan tenaga pengawas. Selain itu juga dilakukan MoU dengan kementerian atau lembaga terkait, termasuk pembangunan 117 gudang yang salah satunya adalah gudang

SRG di Lampung Selatan ini," tegas Bayu saat memberi sambutan dalam acara Pencanaan Operasional SRG sekaligus Peringatan Hari Koperasi ke-67 Tingkat Provinsi Lampung.

Sebagai informasi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten pertama yang mengimplementasikan SRG dari lima kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, yaitu Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pesisir Barat yang dilengkapi dengan kelengkapan gudang berupa *dryer*. Pembangunannya sendiri didanai dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan.

Gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tersebut merupakan gudang SRG yang telah melalui uji coba sosialisasi dan edukasi implementasi SRG di Lampung Selatan. Tercatat, hingga 13 Oktober 2014, telah ada lima resi gudang yang diterbitkan senilai Rp 163.533.300 dengan komoditas gabah yang pembiayaannya dari Bank BJB.



Lebih lanjut Bayu mengatakan, bagi petani, SRG dapat menjadi strategi memperoleh harga terbaik dengan cara menjual komoditas pada musim panen raya di mana harga komoditas cenderung rendah melalui penyimpanan komoditasnya di gudang. Sementara waktu menunggu harga membaik, petani dapat mengagunkan resi gudangnya untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan non-bank.

"Saya berharap SRG ini segera dimanfaatkan oleh petani, kelompok tani, gapoktan, dan koperasi atau UKM, maupun para pedagang dan eksportir sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan, sehingga berbagai manfaat SRG dapat segera dirasakan masyarakat kita, khususnya di provinsi Lampung. Saya harapkan juga kabupaten lain segera menyusul," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, sejalan dengan tema Hari Koperasi Nasional ke-67, yaitu "Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global", Bayu menyatakan, koperasi harus mampu berkreasi dan berinovasi guna pengembangan ekonomi kecil dan menengah, serta mampu menghasilkan produk maupun jasa yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat memanfaatkan potensi pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 600 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,85 % per tahun.

Dalam rangka penguatan koperasi dan sinergitas dengan SRG, pemerintah terus memberikan dukungan dan stimulan melalui bantuan modal kerja, maupun bantuan pengadaan sarana transportasi berupa truk bagi koperasi yang telah menjadi pengelola gudang SRG. Misalnya seperti tahun ini yang telah diberikan kepada empat koperasi pengelola gudang SRG, yaitu Koperasi Tuntung Pandang, Koperasi Annisa, Koperasi Niaga Mukti, dan Kosperimndo.

"Peran Gubernur dan Bupati sangatalah penting untuk menciptakan koordinasi dan sinergi yang kuat antar instansi Pemda (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

terkait mendukung SRG ini," terang Bayu.

Dalam SRG, koperasi dapat berperan sebagai penyimpan barang dengan menghimpun komoditas yang dihasilkan petani untuk dibawa dan disimpan di gudang SRG. Resi gudang dapat dimanfaatkan juga untuk memperoleh pembiayaan guna penguatan modal kerja. Peran lainnya adalah sebagai pengelola gudang SRG, dengan mensinergikan usaha/bisnis hulu (masa tanam dengan penyediaan pupuk, saprotan, maupun pembiayaan prapanen) dan hilir (masa pascapanen dengan pengangkutan, pengolahan maupun pemasaran), koperasi dapat melakukan pengembangan usaha menjadi lebih besar dan lebih kuat.

Bayu juga bilang, koperasi dapat menjadi pengelola gudang SRG. Sehingga, hasil produksi petani bisa mendapatkan nilai tambah. Sebagai pengelola gudang, koperasi dapat menyimpan komoditas yang ada di gudang SRG, lalu mengemas dan memberi merk hingga menjualnya ke pasar swalayan dengan harga lebih tinggi.

"Maka saya tantang koperasi untuk mengelola SRG ini, karena jika dikelola koperasi bisa tembus pasar swalayan, sehingga kita bisa menembus ekonomi global," kata Bayu Krisnamurthi.

Ujung Tombak

Gubernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo, menegaskan, pemanfaatan SRG akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di daerah Lampung. "Dari laporan yang saya terima, selama ini pengelolaannya saja yang belum maksimal, sehingga pemanfaatan yang seharusnya baik, menjadi kurang tepat sasaran. Hal inilah yang membuat para petani pesimis untuk memanfaatkan SRG," ungkapnya.

Karena itu, dia tegaskan, seluruh pihak terkait harus bekerjasama memaksimalkan optimalisasi pemanfaatan SRG. Dia juga mengatakan, gudang SRG di Kabupaten Lampung Selatan sudah siap dimanfaatkan.

Hal itu dikatakan M. Ridho Ficardo, menunjukkan langkah serius Pemprov Lampung dalam memajukan dan mengedepankan sektor pertanian Lampung.

"Pertanian Lampung merupakan ujung tombak kemajuan Provinsi Lampung karena sebagian besar masyarakat kita tinggal di pedesaan dan di mana sekitar 51 % bermata pencarian di bidang pertanian. Maka sudah tidak ada alasan tidak menjadikan sektor pertanian sebagai ujung tombak pendongkrak pendapatan daerah," terang M. Ridho Ficardo.

Tak ketinggalan, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Lampung, Ferynia, juga berharap, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat memanfaatkan SRG untuk menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga pertanian, dan memberi kepastian jual kepada petani.

Rp 345 miliar

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriyono Edi, menjelaskan, sampai dengan 12 Oktober 2014, secara nasional telah diterbitkan 1.651 resi gudang dengan volume sebanyak 69.100,23 ton. Dengan rinciannya, gabah 59.010,91 ton; beras 5.022,47 ton; jagung 4.621,36 ton; rumput laut 420 ton; dan kopi 25,49 ton.

"Total nilai resi gudang yang telah diterbitkan adalah Rp 345,59 miliar dengan pembiayaan mencapai Rp213,9 miliar. Dibandingkan pada periode September 2013, tahun 2014 volume komoditas dalam resi gudang meningkat 26%, nilai komoditi sebesar 26%, dan pembiayaan meningkat sebesar 31%," kata Sutriyono.

Walaupun terus mengalami peningkatan, dia berharap, volume komoditas yang disimpan dalam gudang SRG masih perlu ditingkatkan agar SRG dapat menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam memperhitungkan stok pangan nasional. 📌



Geliat Pasar Lelang Naik 11,24 %

Nilai transaksi pasar lelang komoditi agro (PLKA) periode Oktober 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,24 %.

Periode Oktober 2014, PLKA digelar sebanyak 13 kali penyelenggaraan yang dilakukan oleh 12 provinsi. Secara akumulatif, nilai transaksi bulan Oktober 2014 membukukan hingga Rp 76.627.100.500. Jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada periode September 2014 sebesar Rp 68.886.617.500, maka transaksi periode Oktober 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 7.740.483.000 atau naik 11,24 %. Sedangkan total nilai transaksi PLKA yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan PT iPASAR Indonesia pada bulan Januari hingga Oktober 2014 tercatat sebesar Rp 630.339.266.500.

"Peningkatan transaksi pasar lelang pada bulan Oktober 2014 diakibatkan meningkatnya jumlah penyelenggaraan pasar lelang. Sedangkan untuk PT iPASAR sebagai penyelenggara pasar lelang spot pada bulan Oktober 2014 tidak terdapat transaksi sebagaimana bulan September 2014," kata Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Retno Rukmawati, kepada **Buletin Bappebti**, di Jakarta, Oktober 2014 lalu.

Ada 12 provinsi yang telah menyelenggarakan PLKA pada bulan Oktober 2014 di antaranya, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Ten-

gah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2014 telah melaksanakan PLKA yang ke- 9, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2014. Total transaksi dalam penyelenggaraan PLKA ke-9 itu, membukukan hingga Rp 496.230.500.

Peserta yang melakukan transaksi sebanyak 52 orang penjual dan 5 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Untuk komoditas yang ditransaksikan sebanyak 10 jenis komoditas. "Ada lima komoditi dengan nilai transaksi terbesar, yaitu kelapa, umbi-umbian, cokelat, kelapa dan makanan," kata Retno.

Untuk Disperindag Provinsi Jambi, selama tahun 2014, telah melaksanakan PLKA yang ke-4, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2014. Total transaksi penyelenggaraan PLKA yang ke-4 tersebut, sebesar Rp 3.990.200.000. Sedangkan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 91 orang penjual dan 21 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Untuk komoditas yang ditransaksikan sebanyak 12 jenis dan komoditi dengan nilai transaksi terbesar antara lain biji cokelat, jerang olahan, kemiri, kentang dan kopra.

"Jika dibandingkan dengan nilai tran-

saksi penyelenggaraan PLKA Jambi pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp 6.593.000.000, terdapat penurunan nilai transaksi PLKA bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.602.800.000, atau 39,48 %," kata Retno.

Untuk Disperindag Provinsi Lampung, selama tahun 2014, telah melaksanakan PLKA yang ke-4, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2014. Total transaksinya sebesar Rp 3.940.600.000 dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 34 orang penjual dan 4 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah.

"Komoditas yang ditransaksikan pada penyelenggaraan pasar lelang tersebut sebanyak 16 komoditi dengan nilai transaksi terbesar antara lain alpukat, jahe merah, lada, gabah, kemiri," terang Retno.

Jika dibandingkan dengan nilai transaksi penyelenggaraan PLKA pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp 4.568.500.000, terdapat penurunan nilai transaksi bulan Oktober 2014 sebesar Rp 627.900.000 atau 13,74 %.

Untuk Disperindag Provinsi Jawa Barat, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-8 yaitu pada tanggal 28 Oktober 2014. Transaksinya mencapai Rp 6.897.000.000 dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 5 orang penjual dan 7 orang pembeli yang beras-



al dari berbagai daerah. Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 6 jenis dengan nilai transaksi terbesar yaitu bawang merah, beras, jahe, jengkol dan kayu. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PLKA pada bulan September 2014 sebesar Rp 4.574.300.000, terdapat peningkatan sebesar Rp 2.322.700.000 atau 50,78 %.

Untuk Disperindag Provinsi Jawa Tengah, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-11, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2014. Transaksinya mencapai Rp 3.432.500.000 dengan peserta sebanyak 18 orang penjual dan 5 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Adapun komoditas yang ditransaksikan sebanyak 4 jenis, yaitu beras, jagung, kapulaga, dan kopi.

"Transaksi pasar lelang yang ke-11 ini, meningkat jika dibandingkan penyelenggaraan pasar lelang pada bulan Agustus 2014 yang hanya mencatat transaksi Rp 77 juta," ungkap Retno.

Untuk Disperindag Provinsi Yogyakarta, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan Pasar Lelang Forward yang ke-8 yaitu pada tanggal 22 Oktober 2014. Transaksinya sebesar Rp 6.255.500.000 dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 30 orang penjual dan 6 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah.

Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 6 jenis dengan nilai transaksi terbesar yaitu bawang merah, beras, cabe, kentang dan sapi. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PLKA pada bulan September 2014 sebesar Rp 2.595.000.000, terdapat penurunan sebesar Rp 3.660.500.000 atau 141,06 %.

Untuk Disperindag Provinsi Jawa Timur, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-10, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014. Transaksinya sebesar Rp 20,785 miliar dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 105 orang penjual dan 52 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah.

Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 11 jenis dengan nilai transaksi

terbesar yakni beras, cabe, gula pasir, lada dan sapi. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PLKA pada bulan September 2014 sebesar Rp 41,153 miliar, terdapat penurunan sebesar Rp 20,368 miliar atau 49,49 %.

Untuk Disperindag Provinsi Bali, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-5, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014. Transaksinya sebesar Rp 600 juta dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 6 orang penjual dan 1 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 1 jenis komoditas, yaitu bawang merah. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PLKA pada bulan September 2014 sebesar Rp 5.997.687.500, terdapat peningkatan sebesar Rp 5.205.437.500 atau 657,04 %.

Untuk Disperindag Provinsi NTB, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-6, yaitu pada 13 Oktober 2014. Transaksinya sebesar Rp 1.483.400.000 dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 7 orang penjual dan 6 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 6 jenis dengan nilai transaksi terbesar berasal dari bawang merah, cokelat, kelapa, kopi, dan rumput laut. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PLKA pada bulan September 2014 sebesar Rp 3.211.575.000, terdapat penurunan sebesar Rp 1.728.175.000 atau 53,81 %.

Sulut Gelar 2 Kali

Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-9, yaitu pada 9 Oktober 2014 dan yang ke-10 pada 29 Oktober 2014. "Hanya provinsi ini yang menggelar dua kali penyelenggaraan pasar lelang di bulan Oktober," kata Retno.

Adapun transaksi penyelenggaraan PLKA yang ke-9 mencapai Rp 10.189.234.000 dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 13 orang penjual dan 11 orang pembeli yang be-

rasal dari berbagai daerah. Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 19 jenis dengan nilai transaksi terbesar berasal dari arang, cengkeh, gabah kering panen, ikan nila dan jagung.

Sedangkan transaksi penyelenggaraan PLKA yang ke-10 sebesar Rp 4,918 miliar dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 12 orang penjual dan 3 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 13 jenis dengan nilai transaksi terbesar berasal dari arang, cengkeh, gabah kering panen, jagung dan keong.

Nilai transaksi penyelenggaraan PLKA yang ke-9 dan ke-10 pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 15.107.234.000. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp 5.041.550.000, terdapat peningkatan sebesar Rp 10.065.684.000 atau 199,65 %.

Untuk Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-9, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2014. Transaksinya sebesar Rp 12.589.500.000 dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 8 orang penjual dan 3 orang pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 4 jenis yaitu beras, biji cokelat, dedak dan kedelai.

Untuk Disperindag Provinsi Sulawesi Tenggara, selama tahun 2014 telah menyelenggarakan PLKA yang ke-7, yaitu pada 23 Oktober 2014. Transaksinya sebesar Rp 1.049.936.000 dengan peserta yang melakukan transaksi sebanyak 7 orang penjual dan 1 orang pembeli. Komoditas yang ditransaksikan sebanyak 4 jenis komoditas, yaitu abon, mete, nilam, dan rumput laut. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PLKA bulan September 2014 sebesar Rp 1.141.250.000, maka terdapat penurunan sebesar Rp. 91.314.000. "Transaksinya turun 8 %," tutup Retno Rukmawati. 



In-House Training Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi



Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti Budianti memberi pengarahan pada kegiatan In-House Training Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Bappebti yang diikuti oleh Pegawai Bappebti dengan menghadirkan Pembicara dari Kepala Biro Hukum Bappebti, Kepala Biro Korwas PPNS Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Tingkat Pidana Khusus Kejagung, dan PPNS Bappebti. Acara ini juga diisi dengan presentasi dan simulasi tentang pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (30-31/10)

Talkshow “Manajemen Keuangan dalam Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi”

Bappebti yang diwakili oleh Kepala Bagian Pengawasan Keuangan dan Audit, Widiastuti menjadi salah satu narasumber untuk acara Talkshow bertemakan “Manajemen Keuangan dalam Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi” di Auditorium Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat pada hari Senin, 27 Oktober 2014.

Acara talk show ini dibuka oleh Dekan Sekolah Manajemen Bisnis Universitas Binus, Idris Gautama dan dihadiri oleh 350 orang mahasiswa Univ Binus. Pembicara lain dalam talk show ini adalah Stella Lukman (Head of Product and Services ICDX), Rizal Perwira (Head of Research and Education PT International Mitra Futures) dan Budi Frensidy (Akademisi). Moderator dalam talk show ini adalah Shinta Antasari (Dosen Binus).





Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu mewakili Kepala Bappebti memberikan pengarahan kepada para peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mengenai transaksi kontrak Berjangka Komoditi (Multilateral) di Hotel Grand Angkasa, Medan pada tanggal 23-24 Oktober 2014.

Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK di Medan diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis para pelaku usaha tentang transaksi kontrak berjangka komoditi (multilateral) sehingga dapat mendukung peningkatan transaksi multilateral yang ada di Bursa Berjangka.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan presentasi dari Tim dari Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka mengenai Pemahaman Bursa Berjangka, Mekanisme transaksi di Bursa Berjangka, Spesifikasi Kontrak Berjangka, sistem perdagangan yang digunakan dan peran lembaga Kliring.



FGD Percepatan Implementasi SRG Komoditi Rotan

Kepala Bappebti, Sutriyono Edi didampingi Pejabat Eselon II Bappebti mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Percepatan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Komoditi Rotan di Gedung Bappebti bersama beberapa perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, PT. Bhanda Ghara Rekasa (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Sucofindo, Bank BJB, Bank BRI, dan Wakil Ketua Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI).

Tujuan pertemuan itu untuk mensinergikan program dan kebijakan yang dimiliki kementerian/lembaga terkait dalam mendukung pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) terhadap komoditi Rotan, Jumat, 24 Oktober 2014.



Hedging BUMN Tidak Mesti Gunakan Bursa Berjangka



Langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) valuta asing (*valas*), tidak mesti menggunakan instrumen yang ada di Bursa Berjangka domestik, baik itu JFX (Jakarta Futures

Exchange) ataupun BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia).

"*Hedging* BUMN tidak harus menggunakan bursa berjangka yang ada di Indonesia. Mereka (BUMN) silakan memakai semua *instrument*, baik bursa

berjangka di luar negeri ataupun di dalam negeri," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, belum lama ini.

Bayu juga mengatakan, BUMN juga dapat melakukan *hedging* kepada lembaga keuangan yang menjadi mitranya. "BUMN bisa saja tidak melakukan *hedging* di bursa, karena mereka tidak menggunakan sumber pembiayaan melalui bursa. Tapi, BUMN dapat melakukan *hedging* di perbankan, misalnya, Bank Mandiri, BRI, dan lainnya," jelasnya.

Seperti diketahui, BUMN akan melakukan *hedging* valas untuk mengantisipasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang asing lainnya. **B**

Bisnis SRG Potensial Digarap Generasi Muda



Sistem Resi Gudang (SRG) memiliki sejumlah potensi bisnis yang seharusnya dilakukan kalangan muda. Karena karakteristik SRG merupakan bisnis yang dinamis dan membutuhkan kreativitas.

"Dalam hal pengembangan pasar komoditi unggulan

ekspor Indonesia, kalangan muda tidak mesti menjadi petani. Melainkan menjalankan potensi bisnis SRG seperti bisnis transportasi, penggilingan gabah, pemasaran dan pengemasan komoditi sebelum dipasarkan ke konsumen," demikian antara lain dikatakan Kepala Bappebti, Sutriono Edi, pada sosialisasi SRG di salah satu stasiun radio segmen 'anak muda' di Medan, Sumut, pada Jumat, 10 Oktober 2014, lalu.

"Sebagai produsen komoditi unggulan ekspor, Indonesia sejatinya berpeluang menciptakan pasar yang lebih besar jika kaum muda berperan aktif pada bisnis SRG. Bisnis SRG ini memerlukan kreativitas yang datang dari kaum muda di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini," kata Sutriono.

Lebih jauh dikatakan Sutriono, keikutsertaan kalangan muda di bisnis SRG juga paralel dengan status kelas menengah Indonesia yang didominasi kalangan muda. "Kalau kalangan muda tidak aktif pada bisnis yang berbasis pertanian, bukan tidak mustahil komoditi pangan impor akan merajalela di saat Masyarakat Ekonomi Asean berlangsung pada akhir 2015 mendatang."

"Dalam kaitan percepatan implementasi SRG, pemerintah saat ini menjalankan dua strategi sekaligus. Yakni, mendorong implementasi SRG pada komoditi ketahanan pangan dan komoditi unggulan dengan tujuan ekspor," jelas Sutriono Edi. **B**

Terbukti 'Main Mata' Izin Surveyor Indonesia Terancam Dicabut

Kementerian Perdagangan akan mencabut izin lembaga surveyor ekspor timah – PT Surveyor Indonesia, jika terbukti melakukan pelanggaran sesuai Permendag No. 46/M-Dag/Per/8/2014, tentang, ketentuan umum verifikasi atau penelusuran teknis di bidang perdagangan.

Seperti diberitakan *margind.com* sebelumnya, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengatakan, PT Surveyor Indonesia dinilai banyak melakukan pelanggaran dalam setiap penerbitan laporan surveyor. Hal itu dikatakan Hidayat Arsani, terkait dengan tindakan Kepolisian yang menahan sebanyak 91 kontainer timah siap ekspor yang diduga tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Kami saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti, mereka (PT Surveyor Indonesia) juga sudah kita panggil. Dan kami pun terus berkoordinasi dengan Pemprov Babel. Tetapi 'kan kita tidak



boleh langsung mengambil tindakan, karena kami masih mengumpulkan bukti-bukti itu," jelas Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Partogi Pangaribuan, baru-baru ini.

Lebih jauh dikatakan, tetapi kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, Kementerian Perdagangan akan mencabut izin mereka. "Karena kami 'lah yang memberi izin mereka (PT Surveyor Indonesia) untuk melakukan tugas dan kewenangan surveyor seperti diatur Permendag No. 46 Tahun 2014."

"Tetapi dari informasi yang kami peroleh, tidak semua timah siap ekspor itu bermasalah. Dari sebanyak 91 kontainer itu, ada sebanyak 43 kontainer yang *clear and clean*. Lalu pertanyaannya, kenapa yang 43 kontainer itu tidak langsung dilepaskan? Jadi menurut kami, karena yang 43 itu berada dalam satu kapal, maka biarlah penyelidikannya serentak dan menjadi pelajaran bagi semua pihak," tegas Partogi Pangaribuan. 

Nasib LP2RG Tunggu Keputusan Kemenkeu dan Kementerian BUMN

Panitia Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (LP2RG), sesuai Permendag No. 52/M-DAG/PER/9/2014, tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, telah menetapkan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) – KBI; PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) – Askrindo; dan Perum Jaminan Kredit Indonesia – Jamkrindo, sebagai bakal calon LP2RG.

Seperti yang sudah dijadwalkan pada Permendag No. 52, tersebut, tim seleksi telah melaporkan hasilnya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, pada 19 September lalu. Dan selanjutnya, tim seleksi akan melaporkan kepada Presiden.

Namun, hingga saat ini rekomendasi yang diharapkan dari Kementerian

Keuangan dan Kementerian BUMN belum kunjung datang. Demikian antara lain dikatakan Kabag Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Bappebti, Himawan Purwadi, belum lama ini.

"Sebelum diputuskan oleh presiden, calon LP2RG itu perlu mendapatkan rekomendasi dari Kemenkeu dan Kementerian BUMN. Tetapi karena mungkin masih padatnya kegiatan di akhir masa jabatan kabinet yang ada saat ini, rekomendasi belum diterima oleh tim," kata Himawan.

Lebih jauh dikatakan Himawan, memang untuk memutuskan siapa yang akan ditunjuk sebagai lembaga penjaminan perlu ada kajian mendalam, seperti kecukupan modal dan jaringan lembaga yang akan ditunjuk di berbagai daerah.

"Gudang-gudang SRG itu 'kan ada di berbagai daerah, jadi sudah barang tentu lembaga penjaminan itu ada di berbagai daerah. Inilah salah satu faktor yang perlu dikaji dan dipertimbangkan," jelasnya.

Melihat usia kabinet yang dalam waktu dekat akan berakhir, tambah Himawan, tampaknya penunjukan LP2RG akan diputuskan oleh pemerintahan baru. "Kalau pun pemerintahan baru nantinya segera merespon rekomendasi tim seleksi, paling tidak perlu waktu dua tahun baru LP2RG berdiri.

Sebab untuk menunjuk LP2RG, Presiden harus menerbitkan Peraturan Pemerintah. Di samping itu pun perlu ada persiapan-persiapan seperti sosialisasi. Jadi perkiraan kami paling cepat LP2RG bisa berdiri di tahun 2016," imbuhi Himawan Purwadi. 



BK CPO Malaysia Nol Persen Hingga Akhir Tahun

Bea keluar (BK) atau tarif pajak minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) Malaysia akan tetap nol persen hingga akhir tahun ini. Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Amar Douglas Uggah Embas, menegaskan, langkah itu dimaksudkan untuk mendukung harga dan mengekang penumpukan cadangan.

"Kami berharap ini akan terus mencegah penurunan drastis dalam harga," kata Uggah seperti dikutip Bloomberg, Senin (13 oktober 2014). "Ada kebutuhan untuk memberikan waktu bagi eksportir untuk mengatur seluruh mekanisme termasuk pengiriman dan seterusnya dan sebagainya. Sekarang kita memberi mereka tambahan dua bulan," sambungnya.

Harga CPO berjangka telah jatuh 18 persen tahun ini, di tengah surplus global dalam pasokan minyak nabati, menyakiti keuntungan produsen di Malaysia dan Indonesia, dua pemasok terbesar. Pemerintah Malaysia awalnya membebaskan pajak ekspor untuk September dan Oktober setelah harga turun ke level terendah lima tahun, dan tarif Indonesia juga diatur ke nol persen untuk bulan ini, meningkatkan persaingan.

Menyikapi rendahnya harga CPO di pasar global, Wamendag Bayu Krisnamurthi, mengusulkan agar

PT Pertamina (Persero) menyerap CPO lebih banyak di tengah penurunan harga internasional. Tahun 2013, Pertamina tercatat menyerap CPO sebanyak 1,07 juta kiloliter. Sedangkan di tahun 2014, ditargetkan mencapai sebanyak 4 juta kiloliter.

"Kita sebaiknya mendorong mereka (Pertamina) untuk menyerap CPO lebih banyak. Jika itu bisa dilakukan, mereka tidak kewalahan dengan persediaan CPO tahun depan," ujar Wamendag, Bayu Krisnamurthi, di Gedung Kementerian Perdagangan.

Lebih jauh dikatakan Bayu, dengan menyerap CPO lebih banyak, kita dapat menekan defisit neraca perdagangan akibat impor BBM yang cukup besar. "Di samping itu pun, harga CPO di dalam negeri akan lebih baik," katanya.

"Langkah seperti ini harus terus didorong, agar penggunaan CPO menjadi sebagai biosolar semakin lebih besar," kata Bayu Krisnamurthi. 

Target Ekspor CPO 2014 Tergerus US\$ 9,5 miliar

Menteri Perdagangan, M. Lutfi, perkiraan target ekspor crude palm oil (CPO) untuk tahun 2014 tidak akan mencapai target. Bahkan diperkirakan lebih rendah 5 % dibandingkan ekspor tahun 2013 lalu. Tidak tercapainya target ekspor CPO itu disebabkan rendahnya harga pasar internasional.

"Jika tidak ada terobosan pasar, target ekspor CPO hingga akhir tahun tidak akan tercapai. Kita prediksi lebih rendah 5 % atau sekitar US\$ 9,5 miliar," demikian antara lain dikatakan M. Lutfi, di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, awal Oktober lalu.

Dikatakan Lutfi, penurunan kinerja ekspor CPO itu disebabkan rendahnya harga internasional yang terkoreksi hingga 25 % sejak Januari lalu. "Januari 2014, lalu, harga CPO masih mencapai US\$ 920 per metrik ton. Tetapi kini harganya hanya tersisa US\$ 726 per metrik ton."

Meski pasar ekspor CPO kurang mengembirakan, M. Lutfi, tetap optimis terhadap kinerja industri kelapa sawit di dalam negeri. "Jika industri di dalam negeri konsisten melakukan konversi CPO menjadi biosolar, pasti pasokan internasional berkurang dan harga akan beranjak naik."

"Saya pikir terobosan pemanfaatan CPO sebagai bauran energi harus dilakukan. Sehingga bisa sedikit mengangkat harga CPO di tengah melemahnya permintaan dunia," ujar M. Lutfi. 

Pangsa Pasar Kopi Indonesia ke Eropa Baru Mencapai 3,5 %

Nilai impor komoditi kopi dari daratan benua Eropa mencapai 50 % dari total konsumsi kopi di dunia. Namun dari pangsa pasar kopi sebesar itu, Indonesia baru berkontribusi sekitar 2,6 %. Sementara untuk kawasan Eropa, Indonesia baru memasok sekitar 3,5 % per tahun.

"Nilai impor kopi di tahun 2013 mencapai US\$ 14,5 miliar. Tetapi kita baru berhasil merebut 2,6 % pasar kopi dunia. Sedangkan ke Eropa, baru mencapai 3,5 %," ungkap Dirjen PEN, Kemendag, Nus Nuzulia Ishak, pada keterangan resminya baru-baru ini.

Untuk meningkatkan pangsa pasar kopi Indonesia di kawasan Eropa, Nus bilang, Ditjen PEN dan sejumlah instansi serta asosiasi sepakat menggenjot ekspor kopi yang bernilai tambah. Seperti jenis kopi dengan indikasi geografis yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan standar lainnya.

"Untuk merebut pangsa pasar Eropa, kita harus mempertimbangkan keunikan kopi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain," tandas Nus Nuzulia Ishak. 



Trading Ministry, Rahmat Gobel; "Main task to reduce imports and push export value"

As per President Joko Widodo's direction on first Trading Ministry work cabinet trial who delegated to secure domestic market from import products. And on the same time, increased the volume of major commodity export.

Besides that, the task that need to have serious attention is to secure prices increase of staples approaching Christmas and Year End celebration. It was said by Trading Ministry, Rahmat Gobel, on his speech on Trading Ministry handover ceremony from M. Lutfi, at Trading Ministry office.

"After some visions and missions that have been delivered by President Joko Widodo during Presidential campaign some times ago and after following the direction on today's cabinet trial, I was asked to secure domestic market from incoming import products and on the same time we have to increase export value," Rahmat explained.

For sure this is not an easy task, Rahmat added. We also need to give our attention to other tasks as APEC, G-20 and Asean-MEA 2015 Economic Society. 

Tin price's improved, Tin Pty Ltd profit increases 141%

Tin Pty. Ltd, as per 2014 third quarter has booked significant performance with the increase of tin selling on a quite good price position. The Obligation of tin trading via tin exchanges held by Indonesian Derivative and Commodity Exchange since August 2013, has contributed some effects on the performance improvement of Tin Pty.Ltd.

"Government's plan to restrict tin production in 2015 to 45 thousand tons, will make tin price at international market rapidly increased. We, Tin Pty.Ltd, will support the government policy," Company secretary of Timah Pty Ltd, Agung Nugroho said.

Agung Nugroho also added that the government policy's aim is to exterminate illegal mining that has been existed and causing the environmental damage.

From the data published by Timah Pty.Ltd. until 2014 third quarter it recorded increased net income on 141% for 341.45 Billion, compared to same period last year for 141.48 billion. The increased profit was followed by increased income on 20.78% for 4.35 Trillion.

Meanwhile the company bruto until September 2017 has been recorded on 1.05 Trillion rupiahs. On the other hand, the interest income increased to 16.16 Billion rupiahs from the same period last year which was on 10.48 Billion rupiahs. 

Trading Vice Minister : Tin export must be done by Exchanges

Trading Ministry will not change rule on tin registered exporter's obligation to do transaction at tin exchanges if they want to export tin bar. "This obligation matter is final and will not be changed," Trading Vice Minister Bayu Krisnamurthi emphasized recently.

Previously, Bayu also stated that Trading Minister will find suitable formula to handle problem of tin miner society at Bangka Belitung Province. One of the formulas that has been discussed and reviewed with Babel local government is allowing tin bean production into non bar pure tin. With this new formula, *Permendag* No. 44 Year 2014 on Tin export regulation will be revised.

"Until meantime, the revision on Tin *Permendag* (*Permendag* No. 44 year 2014) is basically done," Bayu explained.

For information, Babel Governor, Rustam Effendi has sent a letter to Trading Minister. On this letter No. 540/332/DPE/2014 signed on 27th of August 2014, Babel Governor has asked Trading Ministry to revise some article on *Permendag* No. 44 year 2014.

One of the subject that mentioned by Rustam is, "We suggest the usage of word "compulsory" on article 12 paragraph (1) of Indonesia Trading Ministry law No. 44/M-DAG/PER/7/2014 can be reviewed and changed to "could". 



PENERBITAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan				
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. Pertani (Persero)					
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	4.500	2.905.875.000
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	4.500	1.395.225.000
2.	PT. BGR (Persero)					
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	40.000	204.000.000
3.	Koperasi Niaga Mukti					
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	6.242	657.260.000
4.	PT. Pos Indonesia (Persero)					
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	5.000	250.000.000
5.	KUD Tuntung Pandang					
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	6.000	404.706.000
Jumlah		Gabah	20	1179	5.248	5.613.066.000
Total		Kopi	1	5	40.000	204.000.000
			21	1.184		5.817.066.000

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan			Pembiayaan		
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. Pertani (Persero)						
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	3	1.570.000.000	BRI
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	2	950.000.000	BRI
2.	PT. BGR (Persero)						
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	-	-	-
3.	Koperasi Niaga Mukti						
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	4	459.602.000	Bank BJB
4.	PT. Pos Indonesia (Persero)						
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	-	-	-
5.	KUD Tuntung Pandang						
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	5	254.000.000	Bank Kalsel
Jumlah		Gabah	20	1179	14	3.233.602.000	
Total		Kopi	1	5	0	-	
			21	1.184	14	3.233.602.000	

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN SEPTEMBER 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode September 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi September 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-September 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	2.451.205.000	4.472.462.500	17.479.742.500
2.	Jambi	Nihil	3.182.120.000	12.232.241.000
3.	Lampung	Nihil	20.009.100.000	4.998.600.000
4.	Jawa Barat	4.574.300.000	14.826.500.000	54.653.855.000
5.	Jawa Tengah	Nihil	10.655.000.000	89.976.615.000
6.	Yogyakarta	2.595.000.000	8.827.000.000	70.911.700.000
7.	Jawa Timur	41.153.000.000	45.660.000.000	146.432.650.000
8.	Bali	5.997.687.500	1.287.900.000	6.835.437.500
9.	NTB	3.211.575.000	4.128.250.000	28.074.425.000
10.	Sulawesi Utara	Nihil	11.339.350.000	69.709.925.000
11.	Sulawesi Selatan	1.617.000.000	5.500.000	25.716.350.000
12.	Sulawesi Tenggara	1.141.250.000	1.846.500.000	12.372.525.000
13.	Gorontalo	6.145.600.000	4.290.500.000	6.899.600.000
14.	DKI	Nihil	Nihil	7.418.500.000
15.	PT iPASAR Indonesia	Nihil	187.932.000	130.000.000
16.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL		68.886.617.500	130.718.114.500	553.842.166.000

Sumber: Bappebti

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE JULI 2014

Komoditas	Penawaran September 2014	Transaksi Januari - Sept 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	630.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	94.000 Kg	0	0
Gondorukem	1.920 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			130.000.000

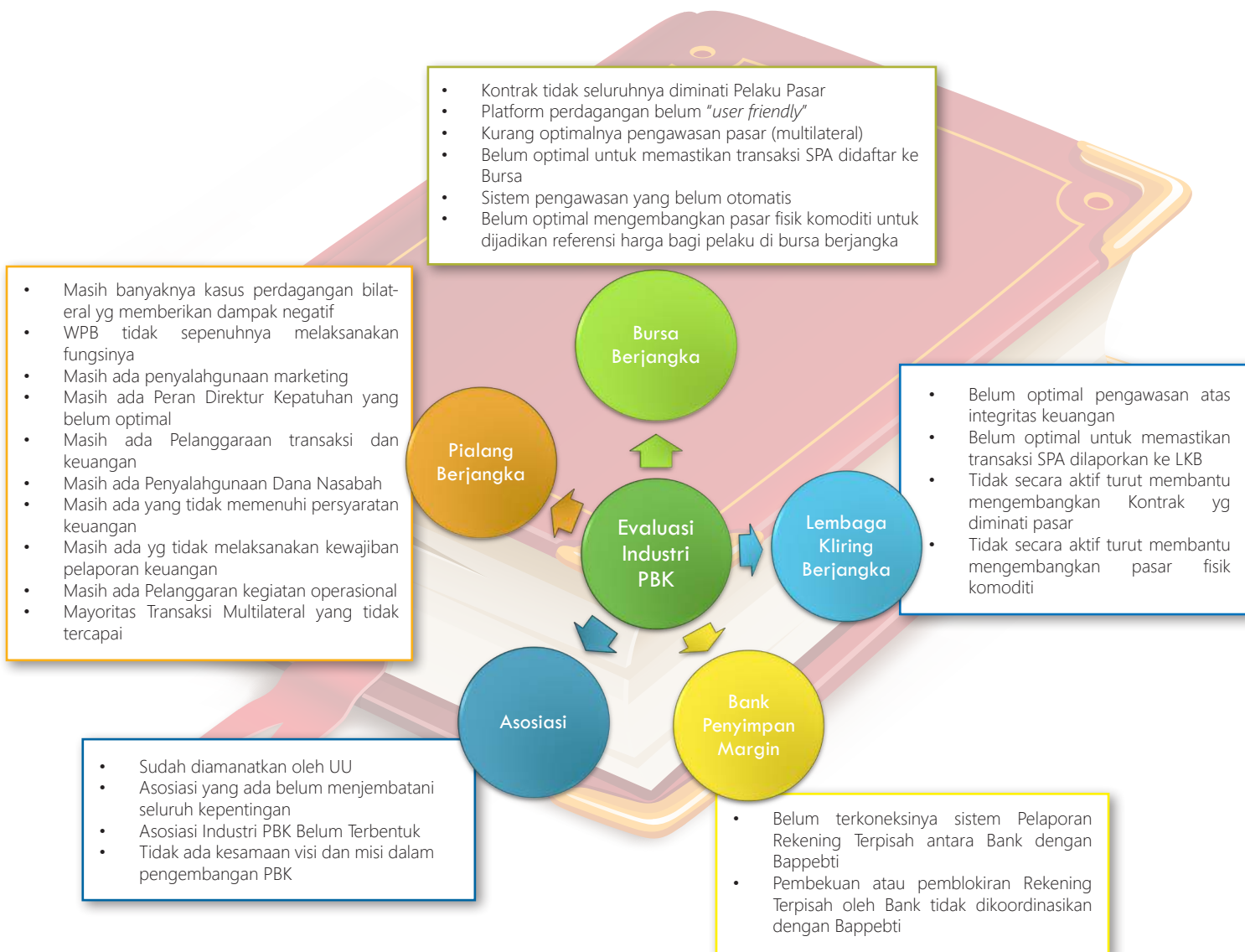
Sumber: PT iPASAR, data diolah

Pembinaan Industri PBK

Pengantar Redaksi:

Bappebti hingga saat ini masih memiliki catatan dari masing-masing stackholder industri perdagangan berjangka komoditi (PBK). Catatan itu diperoleh dari hasil kajian dan laporan masyarakat yang masuk ke alamat Bappebti. Berdasarkan catatan itu, Bappebti pun memetakan dan memecahkan permasalahan yang ada.

Tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Bappebti pun menyusun kebijakan dan arah pengembangan industri PBK di masa mendatang. Setidaknya ada tiga tujuan yang dicapai dari pembinaan yang dilakukan Bappebti, yakni terciptanya integritas industri PBK, bursa berjangka berperan sebagai sarana pembentukan harga dan adanya penegakan hukum serta perangkat peraturannya. Berikut ini skema pembinaan Bappebti terhadap industri PBK;





ARAH KEBIJAKAN

Pembinaan

- Membangun perangkat hukum yang selaras
- Peningkatan integritas, kompetensi dan profesionalisme SDM PBK untuk peningkatan daya saing industri PBK
- Melakukan pembinaan dan kepatuhan dalam industri PBK dengan terlaksananya ketertiban dan etika bisnis yg sehat.
- Meningkatkan kinerja perdagangan kontrak berjangka (olein, kakao, emas, CPO, kopi, karet, batubara dan timah) yang memiliki prospek di bursa
- Meningkatkan Kualitas kontrak berjangka finansial melalui koordinasi & aliansi strategis dengan Kemenkeu, OJK & BI
- Mendukung pengembangan pasar fisik komoditi (olein, kakao, emas, CPO, kopi, karet, batubara dan timah)
- Peran Asosiasi dapat membantu pengembangan Industri PBK

Pengawasan

- Perbaiki sistem transaksi & pelaporan SPA, menggunakan *single platform*;
- Mewajibkan Bursa dan Kliring untuk membangun sistem pengawasan transaksi multilateral dan SPA yang otomatis
- Mewajibkan Pialang untuk mengoneksikan sistem pelaporan keuangan dengan Sistem Pelaporan Keuangan Bappebti
- Mengatur kewajiban pelaporan keuangan & pelaksanaan transaksi Penyelenggara SPA

Pengembangan

- Mewajibkan penyempurnaan sistem transaksi multilateral yang *user friendly* dan mampu meminimalisir adanya manipulasi
- Mewajibkan Bursa membina *desk commodity*, dan Pialang untuk meningkatkan kegiatan *desk commodity*
- Pengembangan sistem yg terkoneksi antara Bank Penyimpan dengan Bappebti,
- Pengembangan aplikasi untuk mengukur *financial literacy* calon Nasabah PBK

Penegakan Hukum

- Pengenaan Sanksi yang Tegas atas setiap Pelanggaran
- Melakukan pemeriksaan & penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran
- Kewajiban pelaporan adanya TKM -PPATK

1. Terwujudnya kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat > pencapaian integritas pasar
2. Mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan > pencapaian *price discovery* dan *hedging effectiveness*
3. Melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK > pencapaian fungsi pengawasan dan *law enforcement*

Bursa berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan. Teratur dalam penyelenggaraan yang dapat dimanfaatkan sepanjang masa. Wajar dalam melakukan transaksi jual-beli komoditi yang terjamin eksistensi maupun legalitasnya. Efisien dalam penyelenggaraannya yang berarti terukur dalam kesatuan waktu, biaya dan besarnya tenaga yang dibebankan. Efektif, memiliki daya guna dalam menghasilkan produk jasa perdagangan berjangka yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak.

Dalam penyelenggaraan, akan mengakomodir segala sesuatu perdagangan komoditi yang semakin berkembang dan diminati para pihak mengikuti perkembangan zaman, jelas merupakan sebuah tantangan penyelenggaraan perdagangan yang tidak mungkin diabaikan apalagi ditinggalkan. Karena hal itu merupakan sebuah harapan masyarakat luas.

Dalam perjalanan penyelenggaraan itu, bursa berjangka telah mengimplementasikannya secara swadaya tanpa subsidi pemerintah. Sehingga diharapkan keberlangsungan operasional perdagangan berjangka dengan segala fungsinya tanpa ketergantungan, tekanan maupun intimidasi dari siapapun yang merugikan semua pihak.

Kemajuan perdagangan berjangka yang berupa perdagangan tukar-fisik komoditi adalah salah satu tugas yang boleh dikatakan berhasil dan digemari semua pihak karena mencerminkan fungsi bursa yang ternyata bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna. Fungsi lindung nilai dalam praktik perdagangan berjangka komoditi masih memerlukan pembedaan kategori dan memerlukan sarana yang memadai dalam mengimplementasikannya.

Dalam praktik perdagangan berjangka di Indonesia, amat sukar membedakan



antara transaksi untuk lindung nilai atau yang ditujukan untuk spekulasi. Karena pembedaan tersebut amat tergantung pada pengakuan nasabah. Seorang Wakil Pialang Berjangka tidak akan sampai mengusik apakah nasabah bersangkutan adalah benar seorang produsen atau seorang pengumpul dan benar memiliki barang dagangannya atau tidak, berhubung ada rasa kekhawatiran bila calon nasabah tersebut tidak lagi bersedia melakukan perdagangan di pasar berjangka bila diusut secermat mungkin seperti itu.

Dan apabila benar seorang nasabah melakukan transaksi lindung nilai, juga akan menjadi ragu ketika harga yang dikehendaknya justru berlawanan dengan arah pasar yang justru akan menemui kerugian ganda, rugi fisik dan rugi lindung nilai. Hal itu berhubung ia tidak terbantu dalam menaksir harga yang menguntungkan. Itu barangkali yang dimaksud sebagai kurang memadai dalam penyelenggaraannya.

Sedang fungsi memberikan transparansi harga merupakan kebanggaan tersendiri bagi

setiap bursa, karena satu-satunya institusi perdagangan yang berani mendeklarasikan adanya transparansi harga dalam penyelenggaraannya, meskipun masih memerlukan partisipasi semua pihak dalam perkembangan era perekonomian global dan menyongsong perdagangan bebas.

Semakin beragamnya jenis komoditi di dunia perdagangan berjangka komoditi memerlukan pembangunan dan kreasi sarana dan prasarana bursa yang wajib dimiliki secara konkrit. Dengan mengutamakan azas skala prioritas dalam memilih produk yang mampu memberikan kepuasan dan manfaat dalam jangka pendek dan panjang bagi semua pihak diharapkan akan memberikan sumbangsih yang besar bagi kemakmuran bangsa sesuai tujuan pembangunan.

Adapun pembangunan sarana dan prasarana bursa dalam mengimplementasikan perdagangan berjangka, dalam memilih produk pilihan akan dimulai dari penentuan spesifikasi produk, pengenalan produk, tempat persediaan, transportasi dan *handling*,



Bambang Prawoto, SE, MM *)

pilihan asuransi, pencatatan dan administrasi, transaksi "on-line" hingga penyediaan tenaga terampil.

Pelayanan Bursa

Pandangan para pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi, khususnya perusahaan pialang dan nasabah akan dengan setia memonitor proses dan prosedur penyelenggaraan perdagangan berjangka yang dilakukan oleh bursa dengan penuh harapan akan mengikutinya hingga didapatkan rasa kepuasan dan manfaat yang bisa dinikmatinya. Kepuasan dalam arti telah terpenuhinya segala kebutuhan yang paling mendesak dalam menunaikan tugas kehidupannya yaitu memperdagangkan komoditi baik untuk jangka pendek maupun panjang. Sedangkan aspek manfaat yang bisa dinikmati dalam arti luas dan bisa disimpulkan dengan keuntungan finansial. Mendapatkan manfaat yang tidak merugikan adalah sebagai prinsip yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Oleh karena itu, pelayanan sampai pada perdagangan yang menguntungkan bagi pengguna terakhir dalam hal ini

nasabah adalah merupakan sebuah prinsip yang mutlak diberikan oleh bursa. Tentu bukan kegiatan yang mudah bagi sebuah bursa untuk melayani para pelaku pasar sampai pada pertanyaan akan ke mana arah harga sebuah komoditi di masa depan baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Fungsi perdagangan berjangka komoditi termasuk bursa sebagai pembentuk harga hingga memberikan transparansi harga nampaknya masih kurang memadai dalam mengarungi era perekonomian global ini.

"Price in the Future", nampaknya perlu ditambahkan sebagai sumbangsih dan daya tarik bursa bila ingin digemari secara konsisten oleh para pelaku pasar. Dengan demikian, eksistensi bursa yang dapat dipakai sebagai sarana dan prasarana sebuah mata pencaharian baru oleh para pelaku perdagangan komoditi berjangka semakin terwujud, dapat diandalkan dan membanggakan.

Berbagai fungsi perdagangan berjangka komoditi yang dijalankan oleh bursa perlu ditunjang oleh pelbagai sarana dan prasarana yang mengetengahkan pengetahuan perdagangan berjangka komoditi sebagai tempat bertanya bagi masyarakat luas dan sekaligus sebagai alat pengembangan perdagangan dalam era globalisasi perekonomian dan perdagangan bebas yang penuh persaingan dan dihadapi terutama oleh bursa itu sendiri. Diperlukannya pusat data produksi komoditi nasional dan internasional, pusat data perdagangan komoditi, pengembangan dan historika harga komoditi, sehingga merupakan sebuah perpustakaan khusus tentang perdagangan komoditi yang berguna bagi bursa dan masyarakat luas.

Forum pengkajian produksi dan perdagangan komoditi berupa lokakarya, seminar, kuliah umum baik untuk kebutuhan sendiri maupun umum sebagai sarana pengabdian masyarakat perlu diselenggarakan sehingga akan semakin dicintai oleh masyarakat luas.

Barometer

Era globalisasi perekonomian dan perdagangan bebas telah ada di depan mata, mekanisme dan perkembangan perdagangan berjangka komoditi dengan segala aspek dan kehidupannya telah berlangsung dengan aman tanpa disertai dengan penolakan secara material maupun politis oleh bangsa kita. Segala amanah dan harapan masyarakat tentang pelayanan umum dalam dunia perdagangan berjangka komoditi akan dapat dipenuhi dengan mencermati dan memberikan pelayanan dalam penuntasan masalah yang segera akan menimbulkan harapan baru sebagai eksistensi produksi komoditi yang semakin bergairah.

Tinjauan dan pengkajian dalam menjawab pertanyaan "Price in the Future" akan menjadi salah satu barometer kemajuan dalam memberikan pelayanan perdagangan berjangka sesempurna mungkin sehingga dapat dipakai sebagai pegangan hidup, mata pencaharian seseorang dalam lapangan perdagangan berjangka komoditi.

Fenomena "Price in the Future" dalam lautan "Price Fluctuation Wave" dalam jangka pendek hingga panjang akan menjadi terurai dalam transaksi-transaksi menguntungkan yang diperankan oleh bursa maupun para anggota dan nasabahnya.

Acuan analisis dalam segala bentuknya untuk menaksir perkembangan harga komoditi akan menjadi prasarana pokok yang dimiliki oleh bursa. Sarana dan prasarana perdagangan berjangka komoditi yang diperluas dalam jangka panjang akan didanai dengan cadangan khusus yang merupakan bagian dari pembagian laba perusahaan bursa setiap tahunnya.

Akhir kata, semua perdagangan komoditi dan bahkan non-komoditi berjangka yang dimiliki bangsa kita akan digantungkan kepada perusahaan bursa berjangka komoditi yang ada di Indonesia. *) *Praktisi Perdagangan Berjangka Komoditi*



Basrah Pardomuan Pionir SRG Kabupaten Langkat

Mendapat amanah menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kab. Langkat, Basrah Pardomuan, mengagas sebuah program yang memiliki dampak positif terhadap sektor perdagangan di daerahnya. Gagasan itu muncul karena selama ini 'kue pembangunan' sangat jarang dinikmati Kab. Langkat, khususnya kalangan masyarakat petani yang hampir 85 % berprofesi sebagai petani.

"Sejak menempati jabatan Kepala Dinas Perindag di tahun 2012, awalnya saya bingung harus mengerjakan apa yang terbaik dilakukan untuk masyarakat terutama petani. Tetapi saya tidak kalah akal. Saya pun mencoba mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk

dari berbagai berita-berita di media masa," kata Basrah.

Suatu ketika saya diberitahu teman, tambahnya, bahwa di Kementerian Perdagangan- Bappebti, ada anggaran bantuan untuk pembangunan gudang yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan komoditi hasil produksi petani. "Saya pun mencari informasi tentang bantuan pembangunan gudang tersebut. Karena masih sangat awam dengan program-program Bappebti, saya pun pelajari apa saja yang sudah dilakukan untuk pembangunan daerah."

"Ternyata dari berita-berita di media, saya ketahui Bappebti telah banyak membangun gudang di daerah dalam skema sistem resi gudang- SRG. Saya

pun bingung, apa itu SRG? Maka saya pun kembali menelusuri tentang SRG dari berbagai informasi dan teman-teman di Dinas Perindag, Provinsi Sumut," ujar Basrah.

Setelah sedikit memahami tentang SRG ini, ucap pria kelahiran Medan, 16 April 1969, ini, dia pun mencoba membuat proposal dan mengirimkannya ke Bappebti. "Ternyata proposal saya ditanggapi, dan mendapat respon positif dari Bappebti. Sehingga terjadilah komunikasi yang intensif untuk merealisasikan pembangunan gudang SRG di Kab. Langkat di tahun 2013."

Itulah sekelumit cerita Basrah Pardomuan, tentang pembangunan gudang SRG di Desa Namu Ukur Utara,

Kec. Bingei, Kab. Langkat.

"Saat ini, gudang SRG itu tinggal kesiapan petani untuk mengisinya. Karena dari sisi fasilitas yang ada, gudang tersebut sudah sangat lengkap. Sebab itu, kami pun terus melakukan sosialisasi kepada petani dan sejumlah instansi terkait. Itu dimaksudkan agar gudang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani. Karena pola tanaman di daerah kami ini, dalam satu tahun bisa empat kali masa tanam. Itu artinya, Kab. Langkat surplus dengan tanaman gabah dan jagung," jelas alumni Fak. Sospol, Univ. Medan Area, 1992, ini.

Terwujudnya gudang SRG di Kab. Langkat, tidak membuat hati Basrah menjadi pongah. Karena disadarinya, langkah mewujudkan pembangunan gudang SRG itu didukung para pemangku kebijakan Kab. Langkat.

"Berdirinya gudang SRG itu karena saya pun mendapat dukungan langsung dari Bapak Bupati Langkat- Ngogesa Sitepu dan anggota legislatif Kab. Langkat. Dukungan itu terbukti dari keluarnya APBD untuk menambah fasilitas gudang SRG. Jumlahnya tidak sedikit, mencapai ratusan juta rupiah. Untuk tahun 2015 mendatang pun, legislatif sudah menyetujui anggaran dari APBD yang dialokasikan ke gudang SRG," ungkap Basrah.

Menurut ayah dari tiga putra ini, anggaran tahun 2015 itu akan diperuntukkan untuk pengadaan fasilitas RMU- *rice milling unit* dan truk. "Memang anggaran itu tidak seutuhnya dari APBD Kab. Langkat, tetapi *sharing* dengan anggaran bantuan pusat."

"Karena itu pula, Pak Bupati- Ngogesa Sitepu, dalam setiap kesempatan pertemuan dengan seluruh SKPD, menekankan kepada Dinas Pertanian, untuk mendorong petani menggunakan fasilitas gudang SRG untuk kepentingan para petani di dalam memperoleh



pembiayaan pasca panen. Jadi ada pembagian tugasnya, kami- Dinas Perindag, hanya mempersiapkan gudang SRG, sedangkan Dinas Pertanian mengisi gudang itu dengan komoditi hasil panen petani," jelas Basrah.

Diterangkan Basrah, kondisi pertanian di Kab. Langkat tidak jauh berbeda dengan di sejumlah daerah. Bahwa para petani sangat memiliki ketergantungan dengan kalangan tengkulak. Sebab itu, di dalam operasional gudang SRG Kab. Langkat, Dinas Perindag juga merangkul kalangan tengkulak. "Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merangkul mereka- tengkulak. Seperti, kita ajak saja mereka berdiskusi bagaimana memajukan sektor perdagangan dari sektor pertanian. Kalau itu yang kita diskusikan, pasti mereka pun akan terbuka dan banyak memberi saran."

"Salah satu saran positif dari mereka itu, para petani diminta untuk membentuk Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Maka dari hasil diskusi itu pun, ada gagasan untuk menjadikan Koperasi Mentari sebagai

Pengelola Gudang. Untuk itu pun, kami sudah menjembatani agar dilakukan kerjasama pendampingan Pengelola Gudang dengan PT Bhanda Ghara Reksha- BGR," katanya.

Dari sisi lembaga pembiayaan, kami pun sudah menjalin kerjasama dengan BRI. Dan, BRI sangat antusias menjadi lembaga pembiayaan SRG di Kab. Langkat. "Karena BRI sangat mengetahui berapa besar potensi SRG di daerah kami ini, dari jumlah cabangnya yang banyak di Kab. Langkat."

"Sebenarnya, dengan potensi hasil produksi gabah dan jagung yang cukup besar dari Kab. Langkat, setidaknya ada 3 unit gudang SRG di setiap kecamatan. Tetapi kami yakin, jika gudang ini akan beroperasi di awal tahun 2015 nanti, dan terbukti membawa manfaat besar bagi perekonomian, akan muncul minat masyarakat untuk membangun gudang dengan skema SRG," terang Basrah.

Saat ini saja, tambahnya, PT Pertani sudah menghubungi kami untuk menggunakan gudang itu sebagai tempat penyimpanan komoditinya. "Tetapi kami dengan terpaksa menolaknya, karena gudang itu diperuntukkan untuk kepentingan hasil produksi petani. Repot nantinya jika petani sudah mau mengisi, ternyata gudang penuh dengan milik mereka."

"Karena itu, saya cukup optimis gudang SRG Kab. Langkat akan menjadi pionir keberhasilan SRG di Sumatera Utara. Sebab sampai saat ini, daerah lain yang sudah memiliki gudang SRG di Sumut, belum melangkah sejauh yang kami sudah lakukan. Padahal, kami tergolong belakangan mendapat bantuan pembangunan gudang SRG dibandingkan kabupaten lain," tutup Basrah Pardomuan. ☺

SISTEM RESI GUDANG



STABILITAS HARGA & PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI
www.bappebti.go.id